

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD)

Oleh :
Kepala BPKAD

Disampaikan Dalam Rangka Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

MISI 1

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

MISI 2

Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berakhlak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman

MISI 3

Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan

MISI 4

Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram.

MISI 5

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

VISI MISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026

VISI

" TERWUJUDNYA
KEJAYAAN LAMONGAN
YANG BERKEADILAN"

KESELARASAN RPJMD (MISI KE 5) DAN RENSTRA BPKAD

RPJMD

Misi 5 “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”

Tujuan “Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa”
Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Sasaran : Meningkatkan Manajemen pemerintahan yang Handal
Indikator Sasaran : Opini BPK

RPJMD

RENSTRA BPKAD

Tujuan : “Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah “.
Indikator Tujuan : Opini BPK

Sasaran Utama ke-1
“Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah ”

Indikator: *Nilai SAKIP BPKAD*

Sasaran Utama ke-2
“Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal”
Indikator: 1. *Prosentase Akurasi Perencanaan APBD, Prosentase deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target, Persentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP*
2. *Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset.*

RENSTRA
BPPKAD

CASCADING PERENCANAAN BPKAD LAMONGAN

Tujuan RPJMD	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa			
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal			
Indikator Sasaran	Opini BPK			
Tujuan BPKAD	Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah			
Indikator Tujuan	Opini BPK			
Sasaran BPKAD	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal			
Indikator Sasaran	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset
Program BPKAD	Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Program	Prosentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat waktu	Prosentase Pelaksanan Pelayanan Penatausahaan Sesuai Standart Daerah	Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.
Kegiatan BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kegiatan	jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun
Sub Kegiatan	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Inventarisasi Barang Milik Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD

CASCADING KINERJA BPKAD LAMONGAN



CROSS CUTTING



ISU STRATEGIS

No	Permasalahan	Isu Stretegis
1.	Penyusunan Perencanaan APBD	Penyusunan Perencanaan APBD harus disusun secara realable untuk mencapai ekonomi pembangun.
		Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan kegiatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila mengalami Refocusing (penganggaran yang dinamis)
2.	Pengelolaan Aset Daerah	Mengidentifikasi pemanfaatan aset daerah dalam pengelolaan aset agar dapat memaksimalkan utilitas penggunaan aset daerah untuk membantu pendapatan bagi daerah
		Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku
3.	Pelaporan Keuangan Daerah	Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian
4.	Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	OPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun, Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran
		Belum adanya sistem aplikasi pelaporan perpajakan yang terhubung antara Bendahara Pengeluaran OPD ke Kantor Pelayanan Pajak

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN BPKAD

INDIKATOR SASARAN BPKAD

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Oprasional
1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	$\frac{\Sigma \text{Kegiatan Perencanaan}}{\Sigma \text{Kegiatan Penganggaran}} \times 100\%$	Pengukuran untuk menghitung Ketepatan antara perencanaan anggaran dengan realisasi belanja daerah
	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	$100\% - \frac{\Sigma \text{Realisasi Belanja Daerah}}{\Sigma \text{Total Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$	Pengukuran untuk menghitung Penyerapan Realisasi belanja dengan anggaran belanja daerah
	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD $\leq$ Batas Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Ukuran capaian kinerja dalam penyampaian pelaksanaan APBD secara tepat waktu
	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	$\frac{\Sigma \text{Aset yang bisa dipergunakan}}{\Sigma \text{Aset Daerah}} \times 100\%$	Pengukuran untuk menghitung jumlah aset yang dipergunakan dengan total aset yang dimiliki

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN BPKAD TRIBULAN I TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN		TARGET	NOMINAL	REALISASI
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Di Perencanaan}}{\text{Jumlah Kegiatan Di Penganggaran}}$	X 100%	95%	$\frac{2443}{2443} \times 100\%$	100%
	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	$100\% - \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	X 100%	10%	$100\% - \frac{439.648.629.298,07}{3.264.718.606.235,00} \times 100\%$	86.53%
	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD $\leq$ Batas Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD	X 100%	100%	25 Juli $\leq$ 31 Juli	Masih dalam Proses
	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	$\frac{\text{Jumlah Aset yang bisa dipergunakan}}{\text{Jumlah Aset Daerah}}$	X 100%	87%	$\frac{7.131.896.846.542,64}{7.397.259.371.248,76} \times 100\%$	96%

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN BPKAD TRIBULAN II TAHUN 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN		TARGET	NOMINAL	REALISASI
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Di Perencanaan}}{\text{Jumlah Kegiatan Di Penganggaran}}$	X 100%	95%	$\frac{2443}{2443} \times 100\%$	100%
	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	$100\% - \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	X 100%	10%	$100\% - \frac{1.141.370.976.341,76}{3.197.501.244.807,00} \times 100\%$	64.3%
	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD $\leq$ Batas Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD	X 100%	100%	25 Juli $\leq$ 31 Juli	Masih dalam Proses
	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	$\frac{\text{Jumlah Aset yang bisa dipergunakan}}{\text{Jumlah Aset Daerah}}$	X 100%	87%	$\frac{7.129.752.837.709,64}{7.412.468.869.251,76} \times 100\%$	96%

CAPAIAN PROGRAM BPKAD KAB LAMONGAN TRIBULAN I

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Indikator : Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu
(Jumlah dokumen anggaran yang disusun tepat waktu/ dokumen anggaran yang dihasilkan) X 100%
0/10 = 100%
Capaian = 0 %

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Indikator : Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah
(Jumlah pelayanan penatausahaan sesuai standard daerah/ jumlah pelayanan penatausahaan) X 100%
9/10 = 100%
Capaian = 90 %

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Indikator : Prosentase ketepatan laporan keuangan
(Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu / jumlah laporan keuangan yang dihasilkan) X100%
1/7 = 100%
Capaian = 14 %

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Indikator : Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.
(Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum / jumlah dokumen barang milik daerah) X 100%
4 / 11 = 100%
Capaian = 36 %

CAPAIAN PROGRAM BPKAD KAB LAMONGAN TRIBULAN II

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Indikator : Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu
(Jumlah dokumen anggaran yang disusun tepat waktu/ dokumen anggaran yang dihasilkan) X 100%
0/10 = 100%
Capaian = 0 %

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Indikator : Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah
(Jumlah pelayanan penatausahaan sesuai standard daerah/ jumlah pelayanan penatausahaan) X 100%
10/10 = 100%
Capaian = 100 %

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Indikator : Prosentase ketepatan laporan keuangan
(Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu / jumlah laporan keuangan yang dihasilkan) X100%
6/7 = 100%
Capaian = 86 %

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Indikator : Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.
(Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum / jumlah dokumen barang milik daerah) X 100%
6 / 11 = 100%
Capaian = 55 %

CAPAIAN KEGIATAN BPKAD KAB LAMONGAN TB 1

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KINERJA			ANGGARAN		
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Laporan	0 laporan	0%	Rp.1.339.209.100	Rp 71.231.100	5,32%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Laporan	3 laporan	25%	Rp. 1.100.000.000	Rp 276.408.700	25,13%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	0 dokumen	0%	Rp. 1.100.000.000	Rp. 66.344.400	6,03%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KINERJA			ANGGARAN		
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	13 Dokumen	4 dokumen	31 %	Rp. 940.000.000	Rp. 229.177.100	24,38%

CAPAIAN KEGIATAN BPKAD KAB LAMONGAN TB 2

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		KINERJA			ANGGARAN		
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Laporan	0 laporan	0%	Rp.1.339.209.100	Rp. 351.114.700	26,22%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Laporan	6 laporan	50%	Rp. 1.100.000.000	Rp. 639.696.700	58,15%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	Rp. 1.100.000.000	Rp. 271.985.700	24,73%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		KINERJA			ANGGARAN		
Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	13 Dokumen	6 dokumen	46 %	Rp. 940.000.000	Rp405.835.640	43,17%



MITIGASI RESIKO

REGISTER RISIKO KECURANGAN (Fraud Control Plan)

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Pengendalian Yang Ada	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi
							Kemungkinan	Dampak	Skala/Tingkat Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8*9	11	12
1	Penganggaran	Intervensi pihak ketiga dalam penyusunan anggaran belanja	Terdapat intervensi dan kurangnya Transparansi dalam penyusunan anggaran kepada tim penyusun APBD	BPKAD KAB. LAMONGAN	1. Sistem keuangan daerah yang belum terintegrasi. 2. Penyusunan anggaran berdasarkan hasil rapat yang dilakukan secara tidak terbuka.	1. Telah dilakukan pengintegrasian Aplikasi SIPD dan SAKTI dalam implementasi Sistem keuangan daerah. 2. Telah dibentuk tim penyusun anggaran serta berkoordinasi dengan berbagai pihak dan OPD terkait. 3. Sebelum dilakukan penetapan APBD telah melalui berbagai proses seperti penyampaian dan pembahasan bersama dengan Bupati dan DPRD mengenai rancangan APBD, yang kemudian dilakukan evaluasi oleh Gubernur	2	4	8	Penyusunan Perencanaan APBD Tidak disusun secara valid dan reliabel	1. Sinkronisasi Data Melalui Aplikasi SAKTI DAN SIPD. 2. Optimalisasi peran UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sehingga mempermudah pengawasan dan pelaporan adanya kegiatan gratifikasi. 3. Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi rancangan secara berjenjang
2	Penganggaran	Gratifikasi dari pihak ketiga dalam penentuan anggaran kegiatan tertentu	Terdapat gratifikasi yang diterima oleh Tim anggaran dalam proses penyusunan anggaran kegiatan / APBD	BPKAD KAB. LAMONGAN	1. Terdapat kerja sama terselubung yang dilakukan secara ilegal dalam penentuan pagu anggaran. 2. Adanya itikad tidak baik dalam memperkaya diri sendiri	1. Penentuan pagu anggaran kegiatan telah diinput menggunakan aplikasi SIPD untuk mengurangi terjadinya pertemuan tatap muka dan gratifikasi. 2. Penyusunan pagu anggaran kegiatan disusun sesuai hasil mufakat secara berkala dan bertahap mulai dari rancangan awal, musrenbang, RKPD, dan penetapan akhir RKPD.	2	4	8	Penyusunan penetapan pagu nggaran menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan	1. Sinkronisasi Data Melalui Aplikasi SAKTI DAN SIPD. 2. Optimalisasi peran UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sehingga mempermudah pengawasan dan pelaporan adanya kegiatan gratifikasi. 3. Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi rancangan secara berjenjang
3	Pelaksanaan	Mark up dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Meninggikan pagu anggaran Kegiatan dengan meninggikan harga belanja sesuai perkiraan sendiri	BPKAD KAB. LAMONGAN	1. Kurangnya Pengawasan selama proses pelaksanaan dan hasil dalam suatu kegiatan. 2. Adanya itikad tidak baik untuk mengambil keuntungan pribadi	1. Penetapan Standar Satuan Harga Telah dilakukan review oleh Inspektorat sebelum digunakan dalam Penyusunan standar harga. 2. Dalam penentuan harga barang Telah dilaksanakan melalui Aplikasi SIPD yang Telah terpusat sehingga Penyusunan Harga harus sesuai dengan standart Harga yang Telah ditetapkan.	2	4	8	Merugikan Keuangan Negara/Daerah	1. Pengoptimalan laporan SSH. 2. Pemanfaatan E-Katalog dalam refrensi satuan harga. 3. Melakukan survey pasar. 4. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai.
4	Pelaporan	Pemberian gratifikasi untuk memperlancar pertanggungjawaban keuangan	Terdapat penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu dalam membantu proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan OPD terkait kepada staf bidang akuntansi	BPKAD KAB. LAMONGAN	1. Tidak tersusunnya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah. 2. Keterlambatan OPD dalam proses penyampaian laporan keuangan	1. Optimalisasi peran UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sehingga mempermudah pengawasan dan pelaporan adanya kegiatan gratifikasi. 2. Pelayanan pendampingan dalam pelaporan keuangan telah dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Sakti untuk mengurangi resiko adanya gratifikasi	3	4	12	Apabila dalam penyampaian pelaporan keuangan mengalami keterlambatan ataupun tidak sesuai dengan SAP maka dapat menimbulkan penurunan penilaian atas LKPD	1. Mengoptimalkan pelayanan pendampingan dalam pelaporan keuangan telah dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Sakti maupun via whatsapp kepada masing masing OPD pendamping untuk mengurangi resiko adanya pertemuan tatap muka dan gratifikasi. 2. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai.
5	Pelaporan	Pemberian gratifikasi untuk memperlancar pembayaran	Terdapat penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu kepada staf bidang perbendaharaan dalam membantu proses pencairan pembayaran	BPKAD KAB. LAMONGAN	1. Kurangnya kelengkapan berkas pendukung dalam proses pencairan. 2. Keterlambatan OPD dalam melakukan proses pengajuan pencairan dana	1. Pelayanan serta pengiriman kelengkapan berkas pengajuan pencairan dilakukan secara online melalui SIPPLA (Sistem Informasi Paperless Perbendaharaan Kabupaten Lamongan) 2. Menerapkan pemberitahuan notifikasi berupa SMS kepada pihak yang mengajukan pencairan	3	4	12	Menimbulkan kebiasaan Suap/Gratifikasi	1. Optimalisasi peran UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sehingga mempermudah pengawasan dan pelaporan adanya kegiatan gratifikasi. 2. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai. 3. Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dan pengajuan, pemberitahuan pencairan telah dapat dilakukan secara online sebagai upaya pencegahan gratifikasi

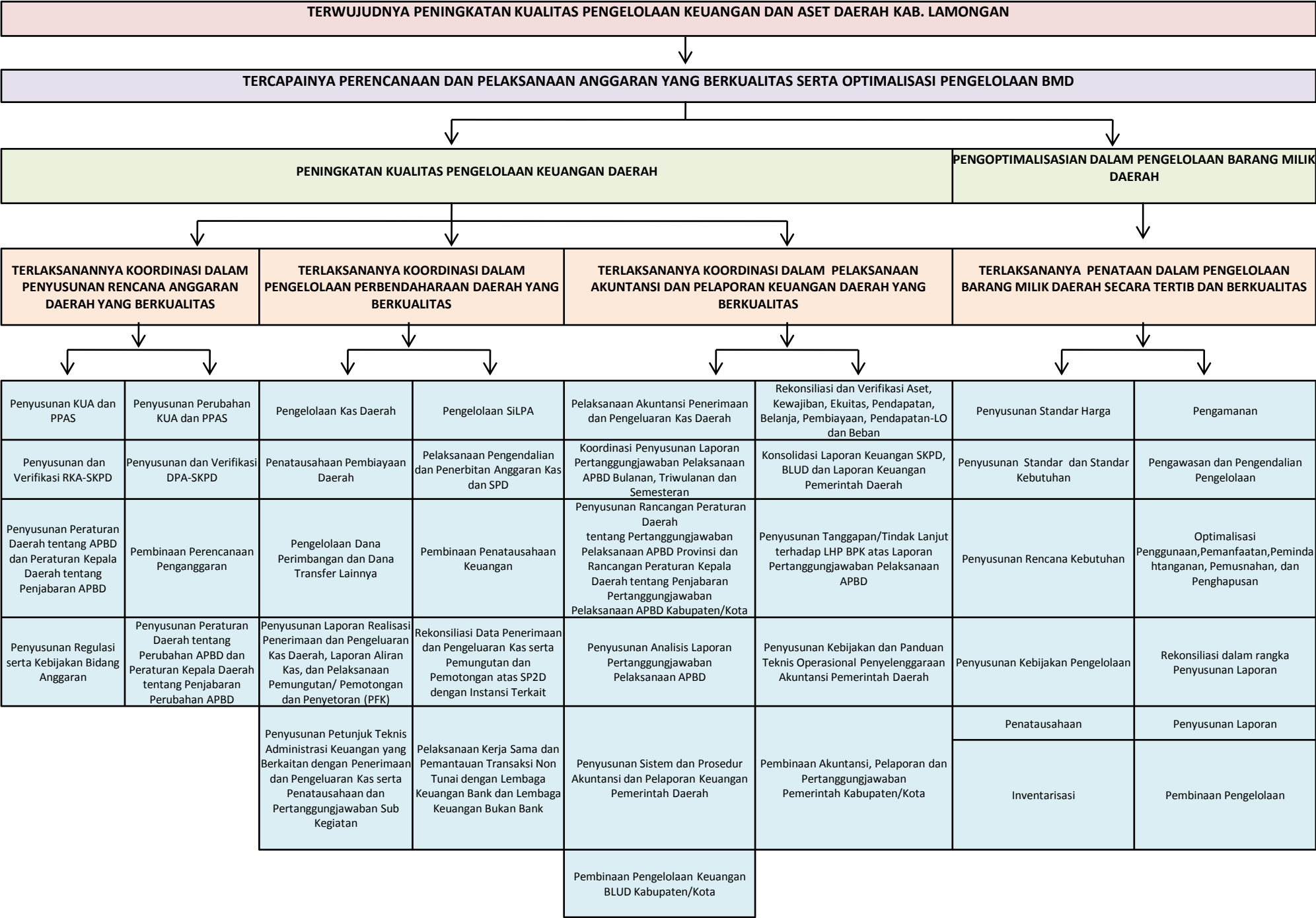
MONITORING TINDAK LANJUT TERHADAP MITIGASI RISIKO FRAUD

No Resiko	Peristiwa Resiko	Mitigasi/ Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progress Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan (selesai/ belum, hambatan)
						Probabilitas Potensi Risiko (1-5)	Dampak Kerugian Risiko (1-5)	Level Resiko R/S/T	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terdapat intervensi dan kurangnya Transparansi dalam penyusunan anggaran kepada tim penyusun APBD	1. Sinkronisasi Data Melalui Aplikasi SAKTI DAN SIPD 2. Optimalisasi peran UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sehingga mempermudah pengawasan dan pelaporan adanya kegiatan gratifikasi. 3. Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi rancangan secara berjenjang	BPKAD KAB. LAMONGAN	1.Pelaksanaan proses sinkronisasi data dilakukan untuk mengoreksi kembali kecocokan data penyusunandengan hasil verifikasi dan evaluasi alokasi anggaran sesuai dengan hasil verifikasi dan evaluasi yang telah di tetapkan. 2. Mengoptimalkan peran UPG dalam monitoring pengendalian gratifikasi secara berkala	100%	1	1	R	Sudah Berjalan dengan Baik
2.	Terdapat gratifikasi yang di terima oleh Tim anggaran dalam proses penyusunan anggaran kegiatan / APBD	1. Sinkronisasi Data Melalui Aplikasi SAKTI DAN SIPD 2. Optimalisasi peran UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sehingga mempermudah pengawasan dan pelaporan adanya kegiatan gratifikasi. 3. Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi rancangan secara berjenjang	BPKAD KAB. LAMONGAN	1.Pelaksanaan proses sinkronisasi data dilakukan untuk mengoreksi kembali kecocokan data penyusunandengan hasil verifikasi dan evaluasi alokasi anggaran sesuai dengan hasil verifikasi dan evaluasi yang telah di tetapkan. 2. Mengoptimalkan peran UPG dalam monitoring pengendalian gratifikasi secara berkala	100%	1	1	R	Sudah Berjalan dengan Baik
3.	Meninggikan pagu anggaran Kegiatan dengan meninggikan harga belanja sesuai perkiraan sendiri	1. Pengoptimalan laporan SSH 2. Pemanfaatan E-Katalog dalam refrensi satuan harga 3.Melakukan survey pasar 4. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai.	BPKAD KAB. LAMONGAN	1. Melakukan probity audit dan survei pasar serta memanfaatkan aplikasi yang telah tersedia dalam melakukan refrensi harga belanja barang atau jasa. 2. Menggunakan aplikasi e-asset untuk monitoring kegiatan PBJ serta melakukan pengawasan secara berkala. 3. Dilakukannya penandatanganan pakta integras kepada seluruh pegawai sebagai wujud integritas ASN	100%	1	1	R	Sudah Berjalan dengan Baik
4.	Terdapat penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu dalam membantu proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan OPD terkait kepada staf bidang akuntansi	1. Mengoptimalkan pelayanan pendampingan dalam pelaporan keuangan telah dapat di lakukan secara online melalui Aplikasi Sakti maupun via whatsapp kepada masing masing OPD pendamping untuk mengurangi resiko adanya pertemuan tatap muka dan gratifikasi. 2. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai.	BPKAD KAB. LAMONGAN	1. Melakukan pendampingan dalam pelaporan keuangan pada masing masing OPD dapat dilakukan secara online baik dari aplikasi maupun via whatsapp sesuai dengan pendamping pada masing-masing OPD guna mengurangi kesalahan dalam penyusunan laporan maupun ketepatan waktu dalam pelaporan. 2. Dilakukannya penandatanganan pakta integras kepada seluruh pegawai sebagai wujud integritas ASN	100%	1	1	R	Sudah Berjalan dengan Baik
5.	Terdapat penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu kepada staf bidang perbendaharaan dalam membantu proses pencairan pembayaran	1. Optimalisasi peran UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sehingga mempermudah pengawasan dan pelaporan adanya kegiatan gratifikasi. 2. Penandatanganan pakta integritas bagi pegawai. 3. Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dan pengajuan, pemberitahuan pencairan telah dapat dilakukan secara online sebagai upaya pencegahan gratifikasi	BPKAD KAB. LAMONGAN	1. Mengoptimalkan peran UPG dalam monitoring pengendalian gratifikasi secara berkala. 2. Dilakukannya penandatanganan pakta integras kepada seluruh pegawai sebagai wujud integritas ASN. 3. Melakukan Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dan pengajuan, pemberitahuan pencairan telah dapat dilakukan secara online kepada petugas pelayanan pencairan sebagai upaya pencegahan gratifikasi	100%	1	1	R	Sudah Berjalan dengan Baik



POHON KINERJA BPKAD

POHON KINERJA BPKAD

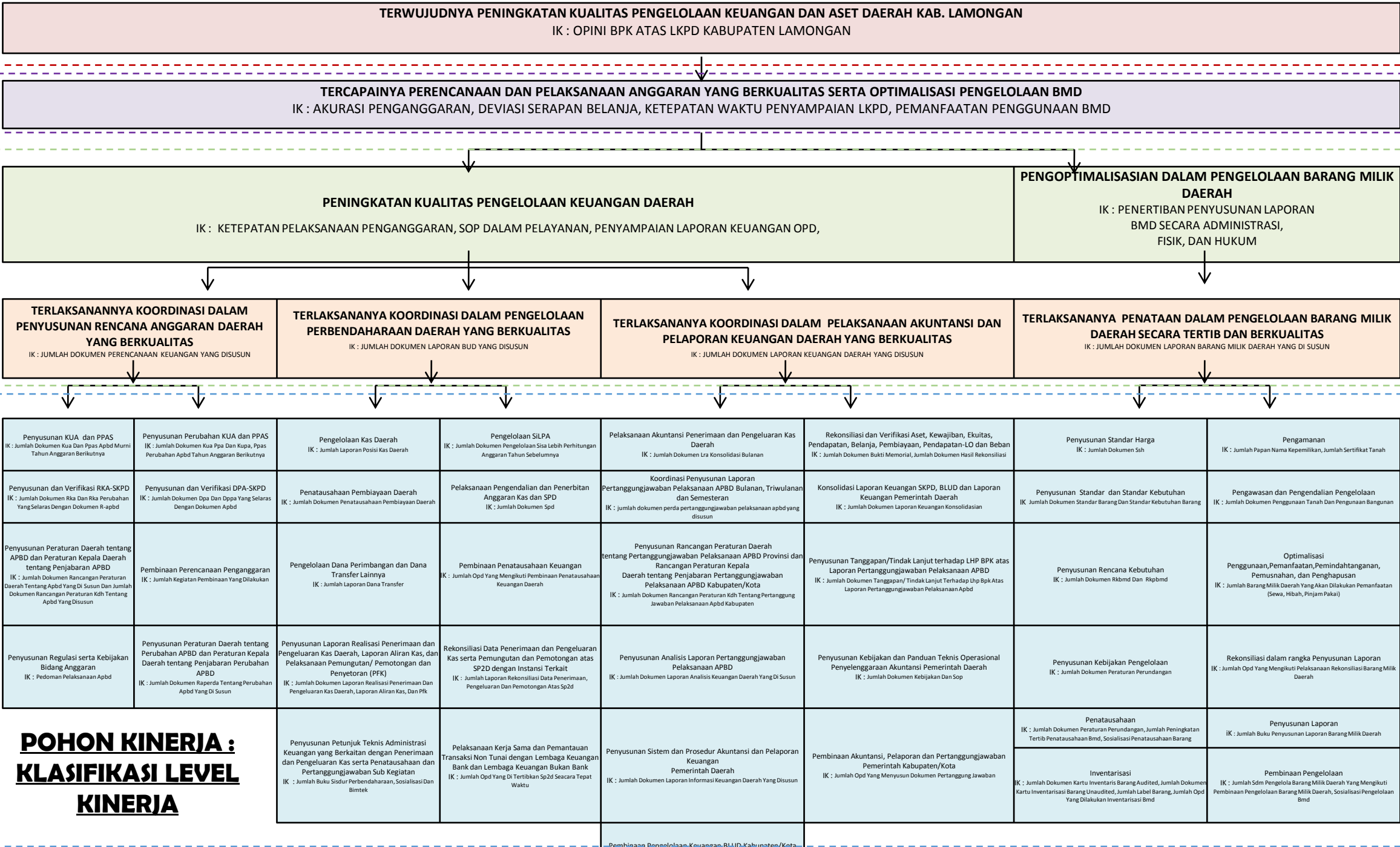


Kinerja
Strategis
Daerah

Kinerja
Urusan/
Sub Urusan

Kinerja
Taktikal

Kinerja
Operasional



MENETAPKAN KINERJA STRATEGIS DAERAH SEBAGAI TUJUAN DAN SASARAN DALAM PERENCANAAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DAN UKURAN KINERJA KEPALA DAERAH

Kinerja
Strategis
Daerah

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. LAMONGAN
IK : OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET				
Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Opini BPK	WTP				
<u>SASARAN STRATEGIS</u>	<u>INDIKATOR SASARAN</u>	n.I	n.II	n.III	n.IV	n.V
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Transparansi dalam Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kab. Lamongan	OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN LAMONGAN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

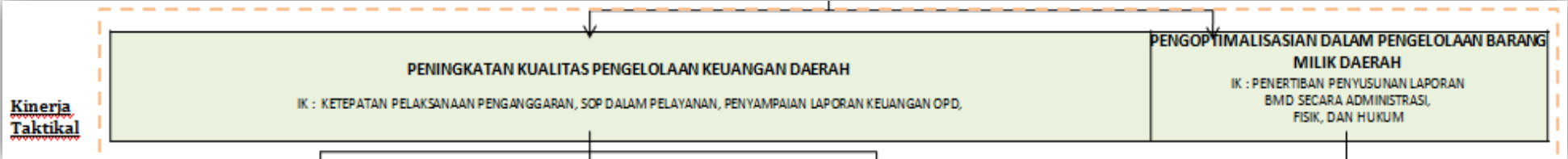
MENETAPKAN KINERJA STRATEGIS URUSAN/BIDANG URUSAN SEBAGAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DALAM PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

Kinerja
Urusan/
Sub Urusan

TERCAPAINYA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS SERTA OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD
IK : AKURASI PENGANGGARAN, DEVIASI SERAPAN BELANJA, KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LKPD, PEMANFAATAN PENGGUNAAN BMD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET				
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Transparansi dalam Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kab. Lamongan	OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN LAMONGAN	WTP				
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	n.I	n.II	n.III	n.IV	n.V
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	1. % Akurasi penganggaran APBD 2. % deviasi penyerapan keuangan sesuai Target 3. % Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP 4. % Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	95% 10% 100% 87%	96% 9,85 100% 89%	97% 9,85% 100 91%	98% 9,80% 100% 92%	99% 9,80% 100% 93%

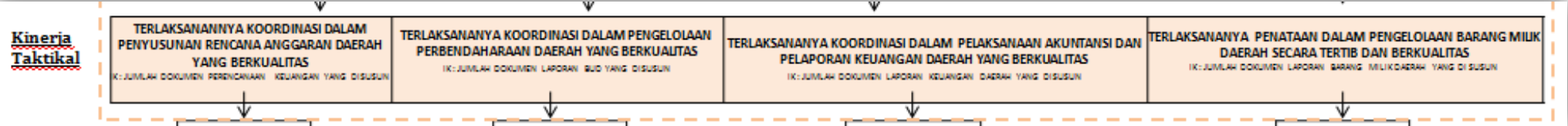
MENETAPKAN KINERJA TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN PROGRAM DAN KINERJA ESELON II



NAMA PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Program	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel Pada Tiap OPD
Indikator Program	1. Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Penganggaran 2. Kesesuaian Sop Dalam Pelayanan Penatausahaan 3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Opd
Target Program	100%

NAMA PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran Program	Peningkatan Dalam Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Secara Transparan Dan Akuntabel Pada Tiap OPD
Indikator Program	Penertiban Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Secara Administrasi, Fisik, Dan Hukum
Target Program	100%

MENETAPKAN KINERJA TAKTIKAL SEBAGAI SASARAN KEGIATAN DAN KINERJA ESELON III



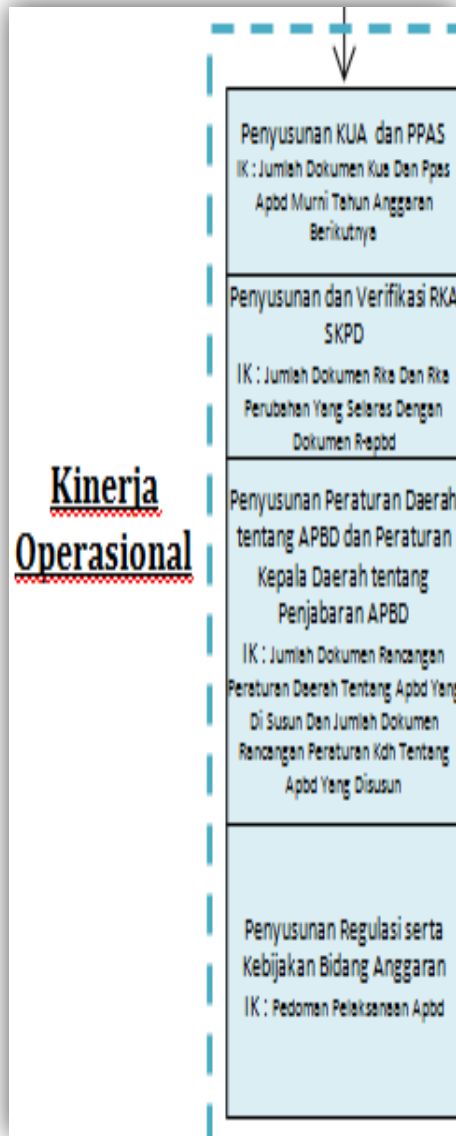
NAMA KEGIATAN	COORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Dalam Meningkatkan Kualitas Penganggaran Dan Perencanaan APBD
Indikator Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan Yang Disusun
Target Kegiatan	4 Dokumen

NAMA KEGIATAN	COORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perbendaharaan
Indikator Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan BUD Yang Disusun
Target Kegiatan	4 Dokumen

NAMA KEGIATAN	COORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan keuangan Daerah
Indikator Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah Yang Disusun
Target Kegiatan	4 Dokumen

NAMA KEGIATAN	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Dan Pembinaan Teknis Dalam Peningkatan Utilitas Penggunaan dan Pengelolaan Penatausahaan Aset Daerah
Indikator Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun
Target Kegiatan	13 Dokumen

MENETAPKAN KINERJA OPRASIONAL SEBAGAI SASARAN SUB KEGIATAN
DAN KINERJA ESELON IV/JABFUNG



NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan KUA dan PPAS
Indikator	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Apbd Murni Tahun Anggaran Berikutnya
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 140.875.400
NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Penyusunan Dan Verifikasi Rka-skpd
Indikator	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 72.161.000
NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
Indikator	Jumlah dokumen Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang di susun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 405.584.100
NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Indikator	Pedoman pelaksanaan APBD 2023
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 64.431.000

MENETAPKAN KINERJA OPRASIONAL SEBAGAI SASARAN SUB KEGIATAN
DAN KINERJA ESELON IV/JABFUNG

	
Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	IK : Jumlah Dokumen Kua, Ppa Dan Kupa, Ppas Perubahan Apbd Tahun Anggaran Berikutnya
Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	IK : Jumlah Dokumen Dpa Dan Dppa Yang Selaras Dengan Dokumen Apbd
Pembinaan Perencanaan Penganggaran	IK : Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilakukan
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	IK : Jumlah Dokumen Raperda Tentang Perubahan Apbd Yang Di Susun

NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
Indikator	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 155.203.700
NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD
Indikator	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 82.313.200
NAMA SUB KEGIATAN	PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan
Target	2 Kali
Anggaran	Rp. 14.090.000
NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Indikator	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang di susun
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 404.550.700

MENETAPKAN KINERJA OPRASIONAL SEBAGAI SASARAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA ESELON IV/JABFUNG

	
Pengelolaan Kas Daerah	IK : Jumlah Laporan Posisi Kas Daerah
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	IK : Jumlah Laporan Dana Transfer
Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran (PFK)	IK : Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pfk

NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Pengelolaan Kas Daerah
Indikator	Jumlah Laporan Posisi Kas Daerah
Target	288 Laporan
Anggaran	Rp. 125.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Indikator	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 25.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Indikator	Jumlah Laporan Dana Transfer
Target	4 Laporan
Anggaran	Rp. 125.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN Fihak KETIGA
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam PenyusunanRealisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Indikator	Pedoman pelaksanaan APBD 2023
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 64.431.000

MENETAPKAN KINERJA OPRASIONAL SEBAGAI SASARAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA ESELON IV/JABFUNG

Pengelolaan SilPA IK : Jumlah Dokumen Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD IK : Jumlah Dokumen Spd
Pembinaan Penatausahaan Keuangan IK : Jumlah Opd Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait IK : Jumlah Laporan Rekonsiliasi Data Penerimaan, Pengeluaran Dan Pemotongan Atas Sp2d

NAMA SUB KEGIATAN	PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Indikator	Jumlah dokumen pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. -
NAMA SUB KEGIATAN	PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Indikator	Jumlah dokumen SPD
Target	252 dokumen
Anggaran	Rp. 125.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah.
Target	62 OPD
Anggaran	Rp. 205.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT
Sasaran	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
Indikator	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D
Target	62 OPD
Anggaran	Rp. 210.000.000

MENETAPKAN KINERJA OPRASIONAL SEBAGAI SASARAN SUB KEGIATAN
DAN KINERJA ESELON IV/JABFUNG

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan IK : Jumlah Buku Sisdur Perbendaharaan, Sosialisasi Dan Bimtek	Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank IK : Jumlah Opd yang Di Tertibkan Sp2d Secara Tepat Waktu
---	---

NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Indikator	Jumlah buku Sisdur perbendaharaan, sosialisasi dan bimtek
Target	100 Buku
Anggaran	Rp. 185.000.000

NAMA SUB KEGIATAN	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Indikator	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D seacara tepat waktu
Target	62 OPD
Anggaran	Rp. 50.000.000

**MENETAPKAN
KINERJA
OPRASIONAL
SEBAGAI
SASARAN SUB
KEGIATAN DAN
KINERJA ESELON
IV/JABFUNG**

Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah IK : Jumlah Dokumen Lra Konsolidasi Bulanan
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulana Triwulanan dan Semesteran IK : jumlah dokumen perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd yang disusun
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota IK : Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD IK :Jumlah Dokumen Laporan Analisis Keuangan Daerah Yang Di Susun

NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Indikator	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan
Target	12 Dokumen
Anggaran	Rp. 25.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Indikator	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun
Target	12 dokumen
Anggaran	Rp. 141.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 320.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Indikator	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang di susun
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. -

**MENETAPKAN
KINERJA
OPRASIONAL
SEBAGAI
SASARAN SUB
KEGIATAN DAN
KINERJA ESELON
IV/JABFUNG**

↓
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban IK : Jumlah Dokumen Bukti Memoriel, Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah IK : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Konsolidasian
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD IK : Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap Lhp Bpk Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah IK : Jumlah Dokumen Kebijakan Dan Sop

NAMA SUB KEGIATAN	REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN
Sasaran	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi
Target	130 Dokumen
Anggaran	Rp. 160.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Konsolidasi Dalam Laporan Keuangan Skpd, Blud Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasian
Target	2 dokumen
Anggaran	Rp. 199.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN TANGGAPAN/TINDAK LANJUT TERHADAP LHP BPK ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Indikator	Jumlah dokumen tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Target	7 Data
Anggaran	Rp. 29.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Indikator	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. -

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah IK : Jumlah Dokumen Laporan Informasi Keuangan Daerah Yang Disusun	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota IK : Jumlah Opd Yang Menyusun Dokumen Pertanggung Jawaban
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota IK : Jumlah Opd Yang Menyusun Dokumen Pertanggung Jawaban	

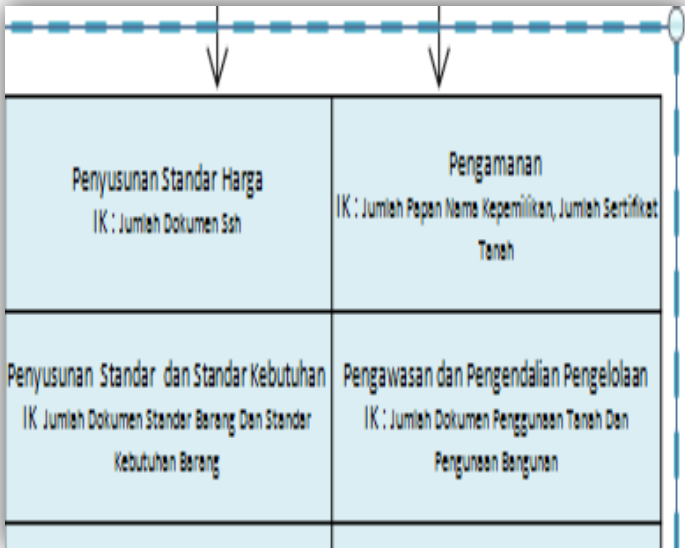
MENETAPKAN KINERJA OPRASIONAL SEBAGAI SASARAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA ESELON IV/JABFUNG

NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. -

NAMA SUB KEGIATAN	PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban
Target	62 Dokumen
Anggaran	Rp. 184.000.000

NAMA SUB KEGIATAN	PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA
Sasaran	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah BLUD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban
Target	35 Dokumen
Anggaran	Rp. 42.000.000

MENETAPKAN KINERJA OPRASIONAL SEBAGAI SASARAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA ESELON IV/JABFUNG



NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN STANDAR HARGA
Sasaran	Terlaksananya Penyusunan standar harga
Indikator	Jumlah Dokumen SSH
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 65.000.000

NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 30.000.000

NAMA SUB KEGIATAN	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Pengamanan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah Sertifikat Tanah
Target	50 bidang
Anggaran	Rp. 125.000.000

NAMA SUB KEGIATAN	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya koordinasi dalam Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan penggunaan bangunan
Target	3 Dokumen
Anggaran	Rp. 110.000.000

**MENETAPKAN
KINERJA
OPRASIONAL
SEBAGAI
SASARAN SUB
KEGIATAN DAN
KINERJA ESELON
IV/JABFUNG**

Penyusunan Rencana Kebutuhan IK : Jumlah Dokumen Rkbmd Dan Rkpbmd
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan IK : Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan
Penatausahaan IK : Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan, Jumlah Peningkatan Tertib Penatausahaan Bmd, Sosialisasi Penatausahaan Barang
Inventarisasi IK : Jumlah Dokumen Kartu Inventaris Barang Audited, Jumlah Dokumen Kartu Inventarisasi Barang Unaudited, Jumlah Label Barang, Jumlah Opd Yang Dilakukan Inventarisasi Bmd

NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMd
Target	1 Dokumen
Anggaran	Rp. 50.000.000

NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah dokumen peraturan perundangan
Target	1 dokumen
Anggaran	Rp. 50.000.000

NAMA SUB KEGIATAN	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang
Target	10 buku dan 65 OPD
Anggaran	Rp. 55.000.000

NAMA SUB KEGIATAN	INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD
Target	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 62 OPD
Anggaran	Rp. 165.000.000

MENETAPKAN
KINERJA
OPRASIONAL
SEBAGAI
SASARAN SUB
KEGIATAN DAN
KINERJA ESELON
IV/JABFUNG

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan IK : Jumlah Barang Milik Daerah Yang Akan Dilakukan Pemanfaatan (Sewa, Hibah, Pinjam Pakai)
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan IK : Jumlah Opd Yang Mengikuti Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan IK : Jumlah Buku Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan IK : Jumlah Sdm Pengelola Barang Milik Daerah Yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sosialisasi Pengelolaan Bmd

NAMA SUB KEGIATAN	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)
Target	62 OPD
Anggaran	Rp. 35.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah
Target	62 OPD
Anggaran	Rp. 90.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Indikator	Jumlah buku penyusunan laporan barang milik daerah
Target	2 Dokumen
Anggaran	Rp. 130.000.000
NAMA SUB KEGIATAN	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran	Terlaksananya Koordinasi dalam Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD
Target	62 OPD
Anggaran	Rp. 35.000.000



PETA PROSES BISNIS

SKEMA PROSES BISNIS BPKAD I AMONGAN

PROSES BISNIS MANAJEMEN

PENGELOLAAN KINERJA

KEPATUHAN INTERNAL

MITIGASI RESIKO

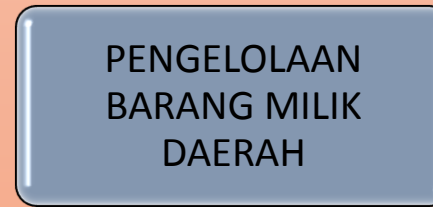
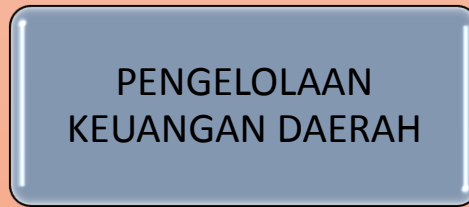
PROSES BISNIS INTI

SUPPLIER

INPUT

OUTPUT

CUSTOMER



PROSES BISNIS PENDUKUNG

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

KETERSEDIAAN SDM

ORGANISASI

SARANA
PRASARANA

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Pengelola Kinerja :

Menyelaraskan SOP sesuai dengan visi dan misi. Dalam Pengelolaan Kinerja BPKAD selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah ditetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal :

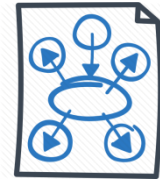
Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

Mitigasi Resiko:

Memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul



Evaluasi
Kinerja



Perencanaan
Kinerja

Pengelola
an Kinerja

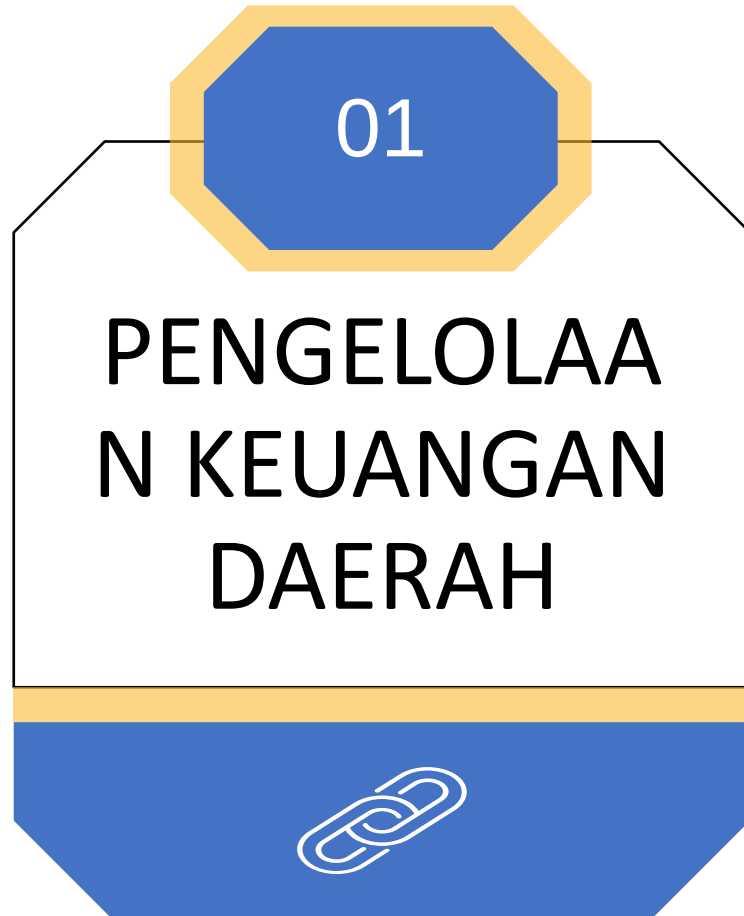


Pelaporan
Kinerja

Pengukuran
Kinerja

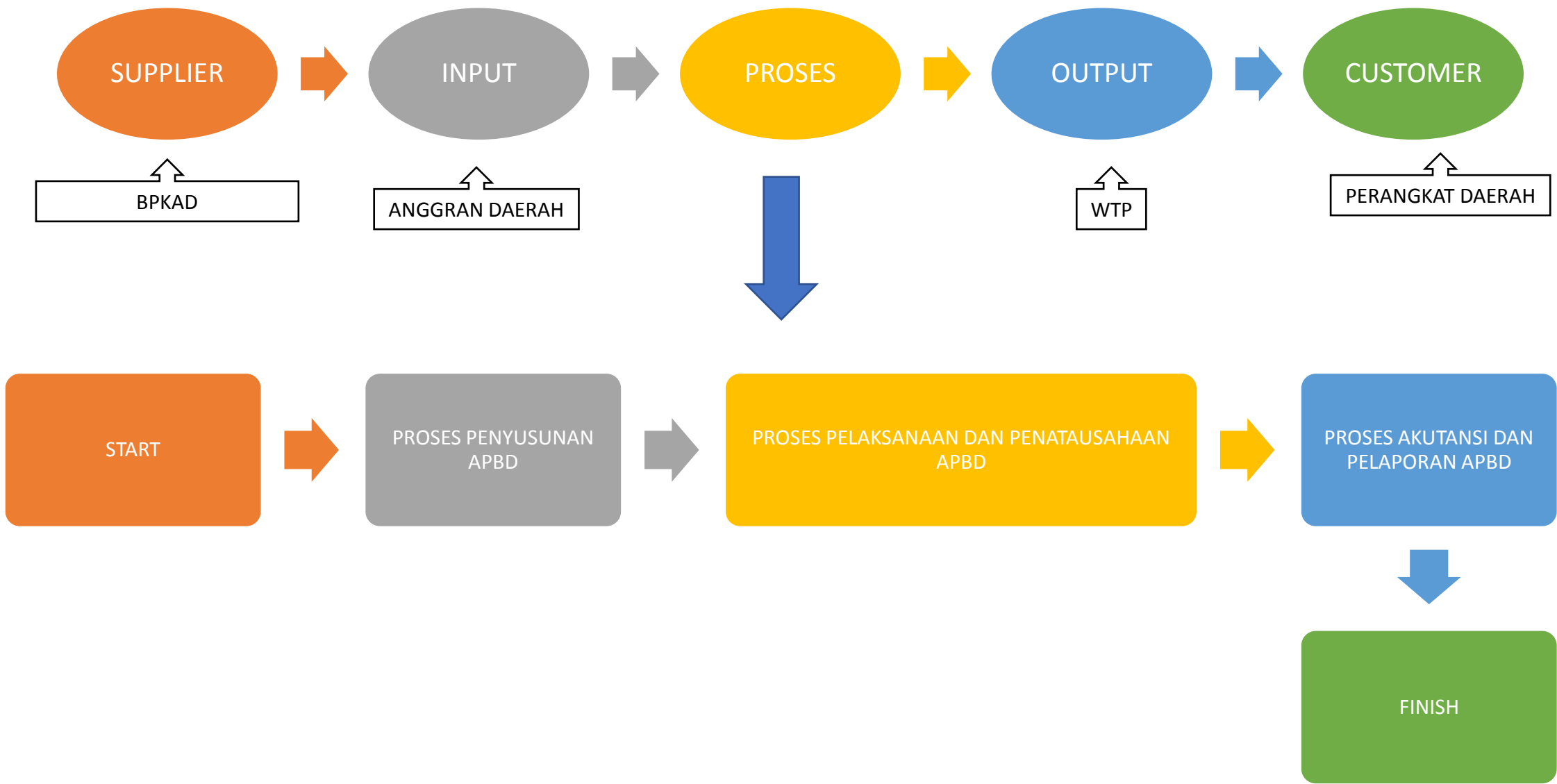


PROSES BISNIS INTI BPKAD LAMONGAN



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

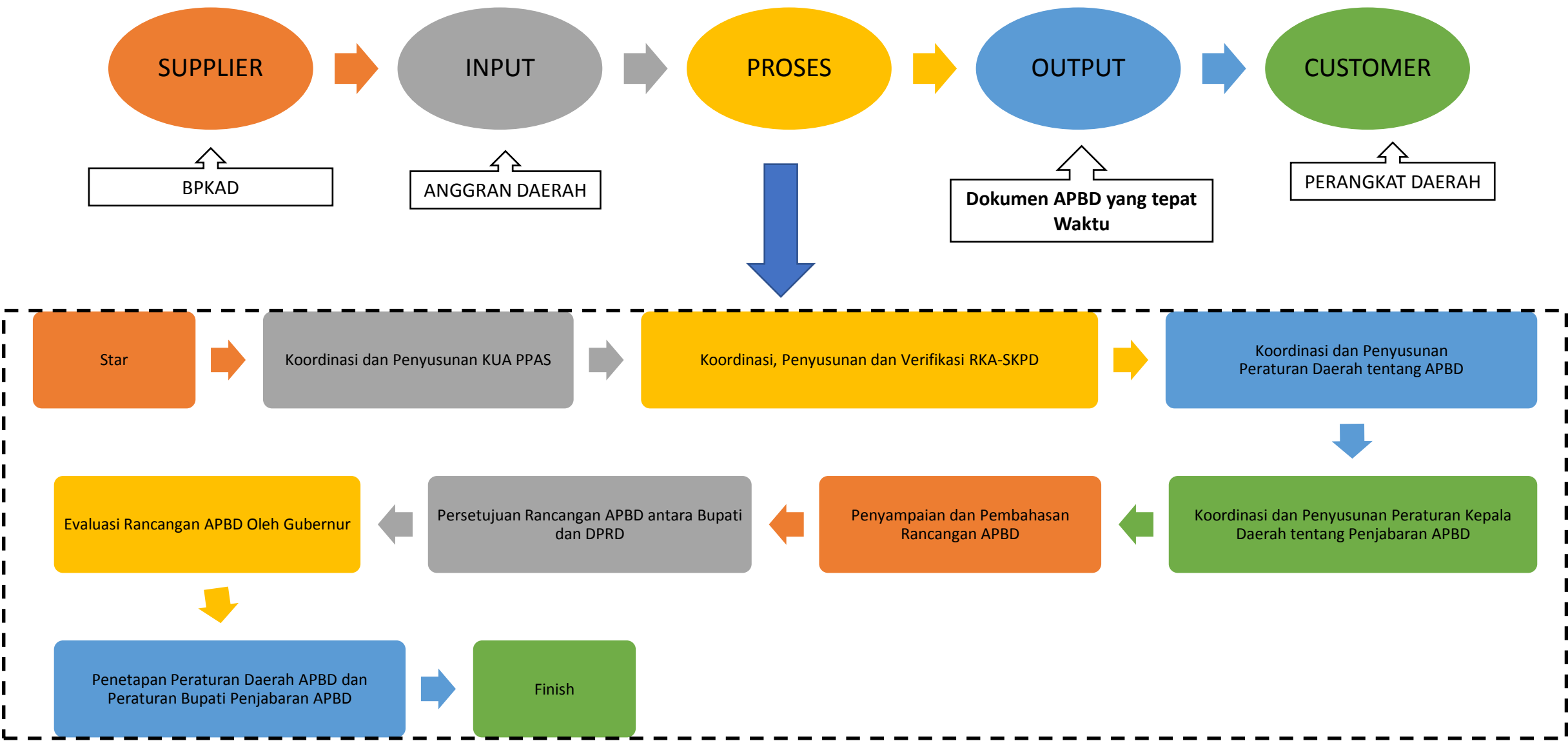
LEVEL I



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL II

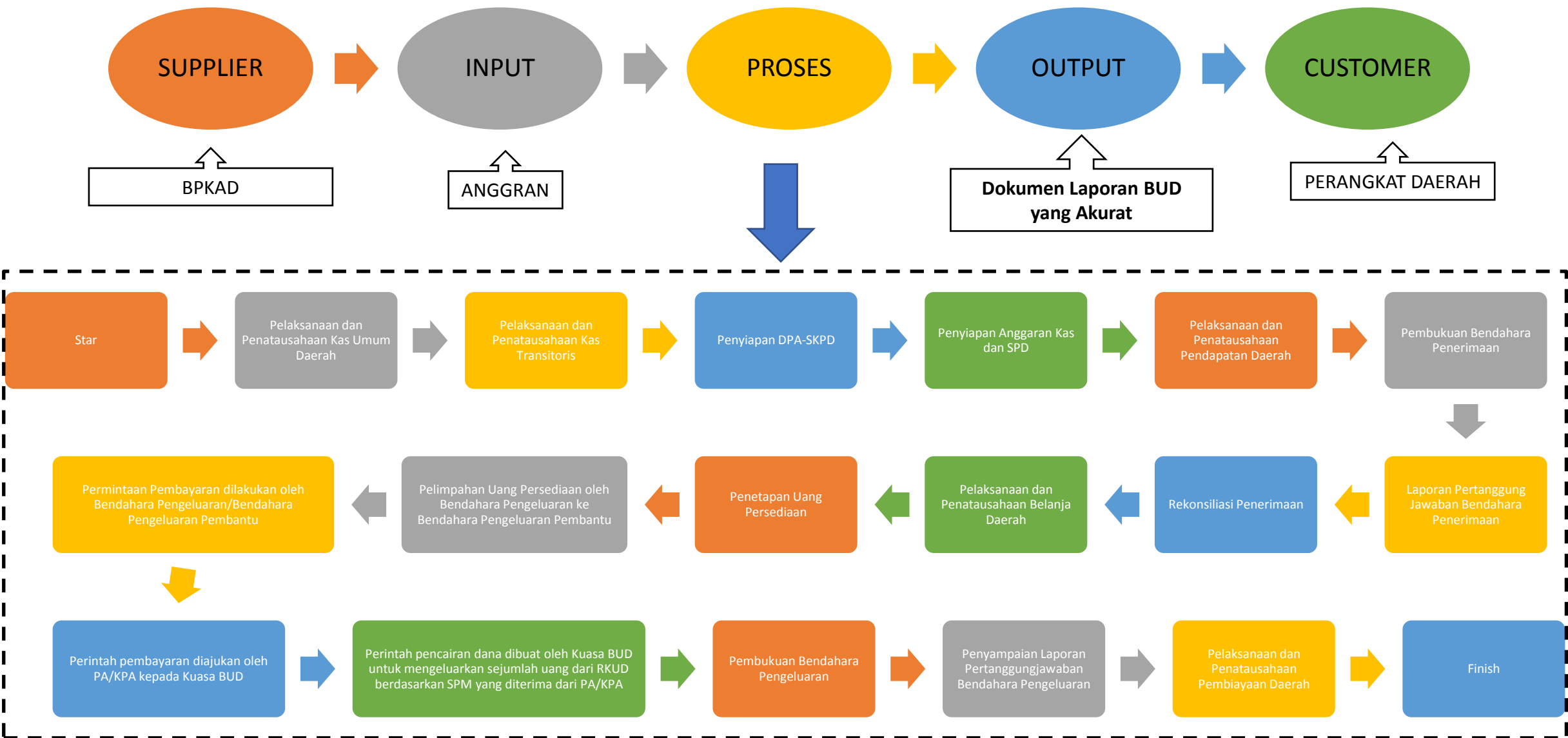
PROSES PENYUSUNAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

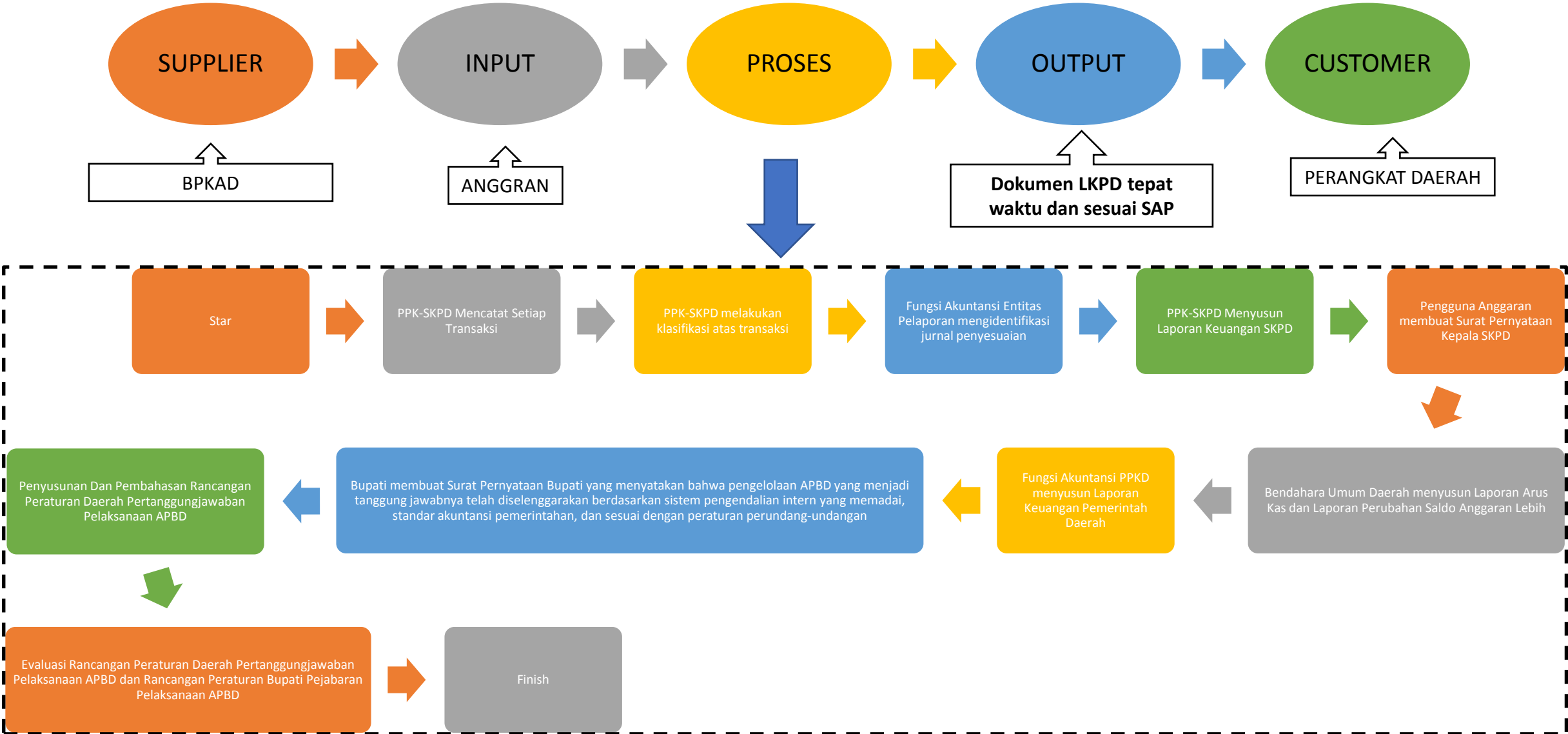
LEVEL II

PROSES PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD



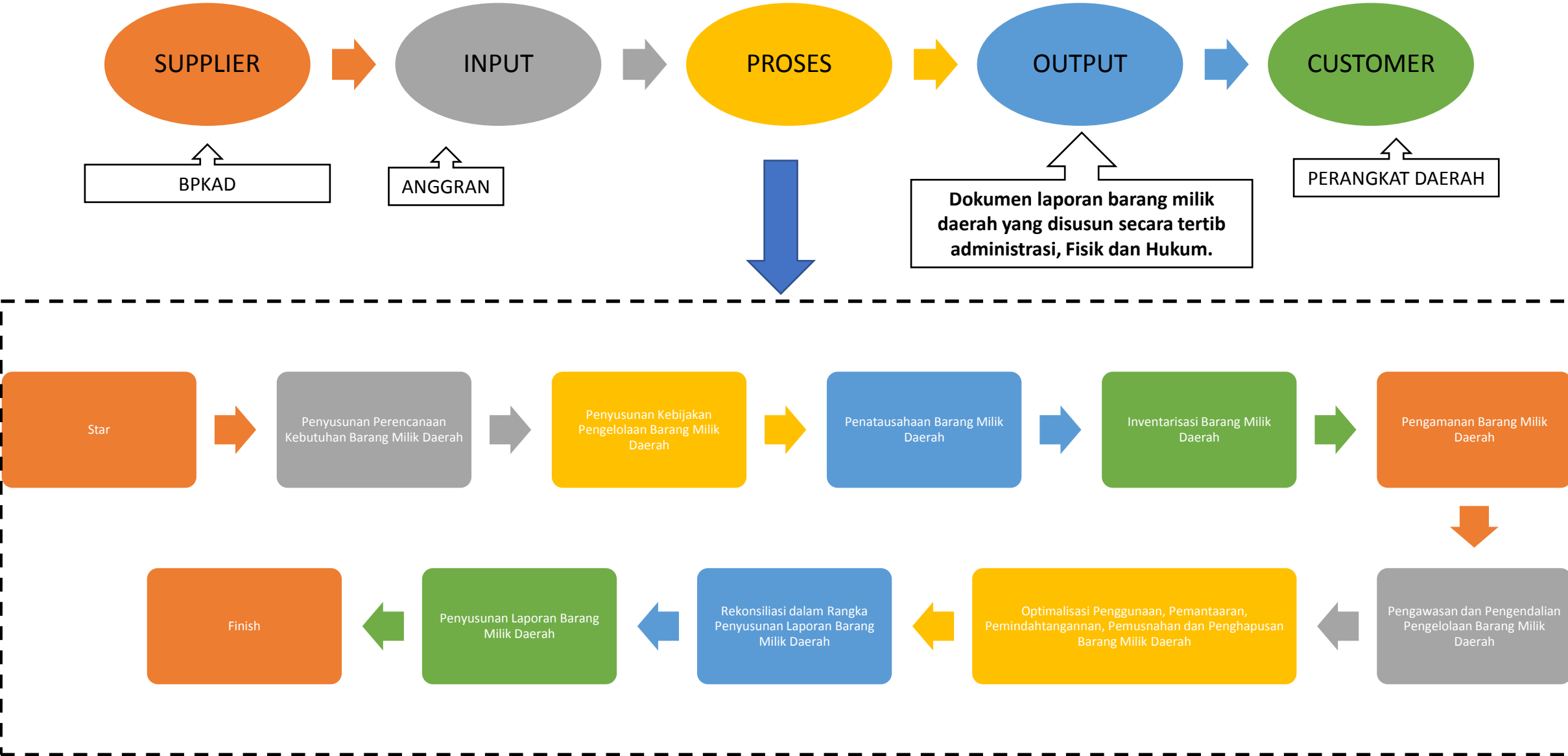
PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES AKUTANSI DAN PELAPORAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

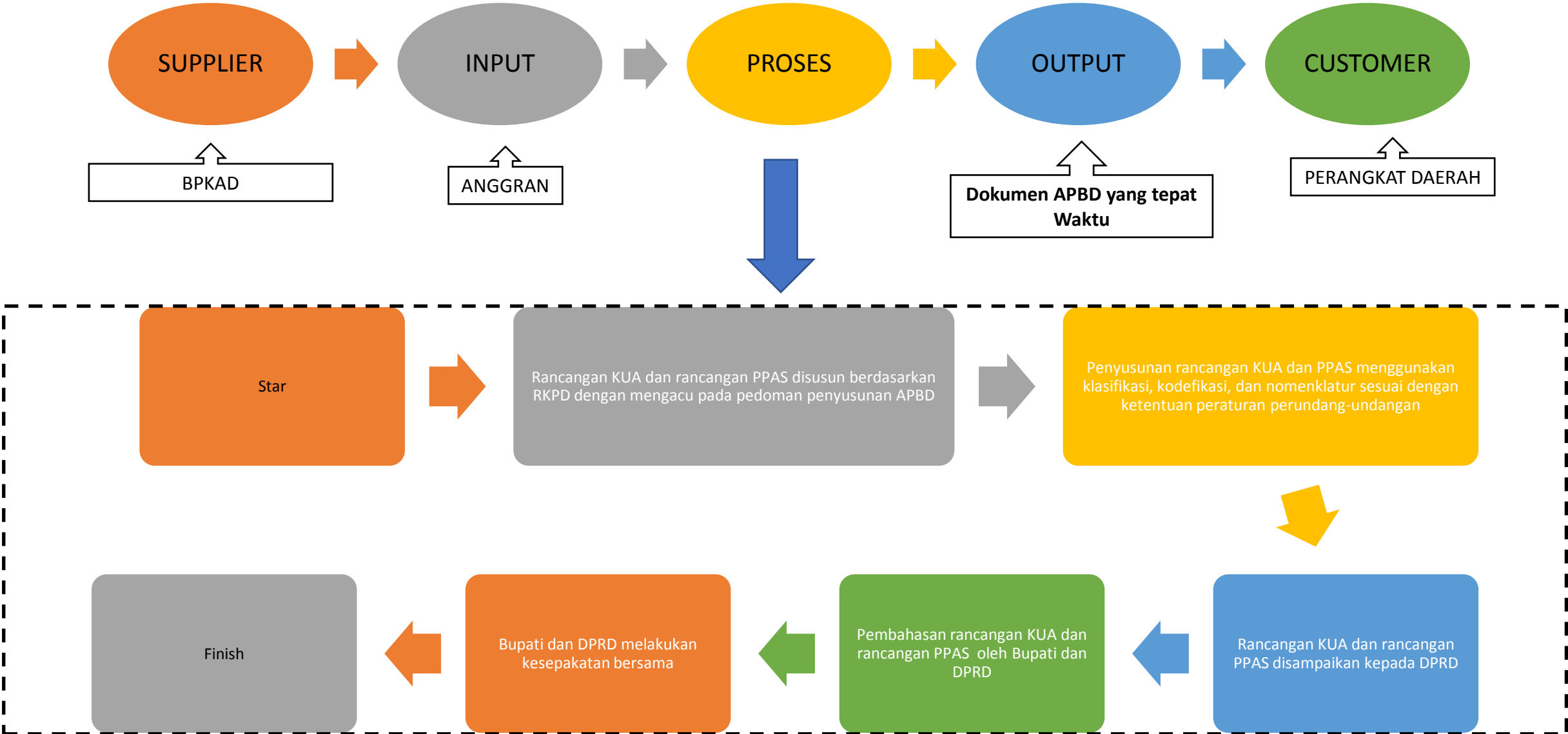
LEVEL II



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

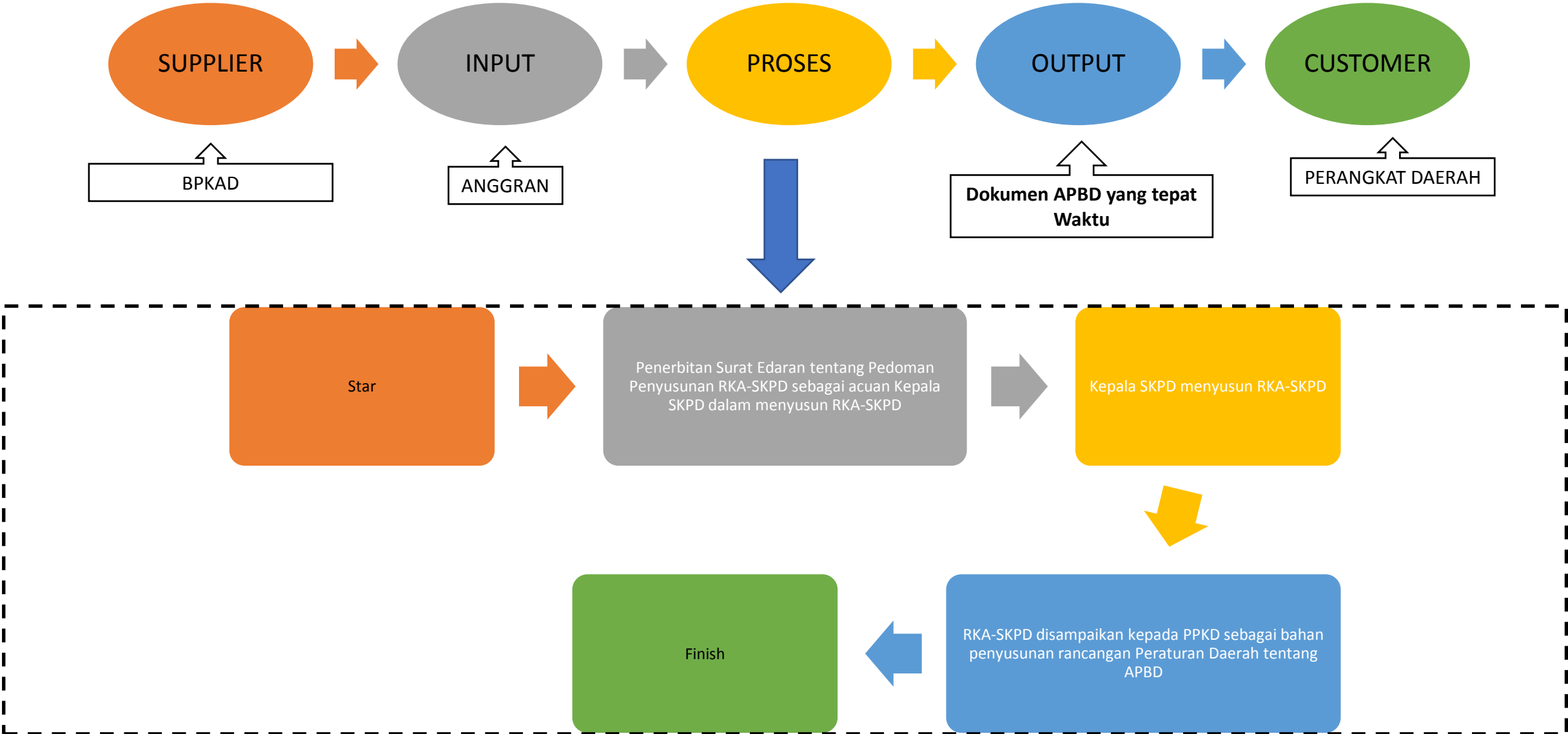
LEVEL III

Proses Penyusunan KUA PPAS



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

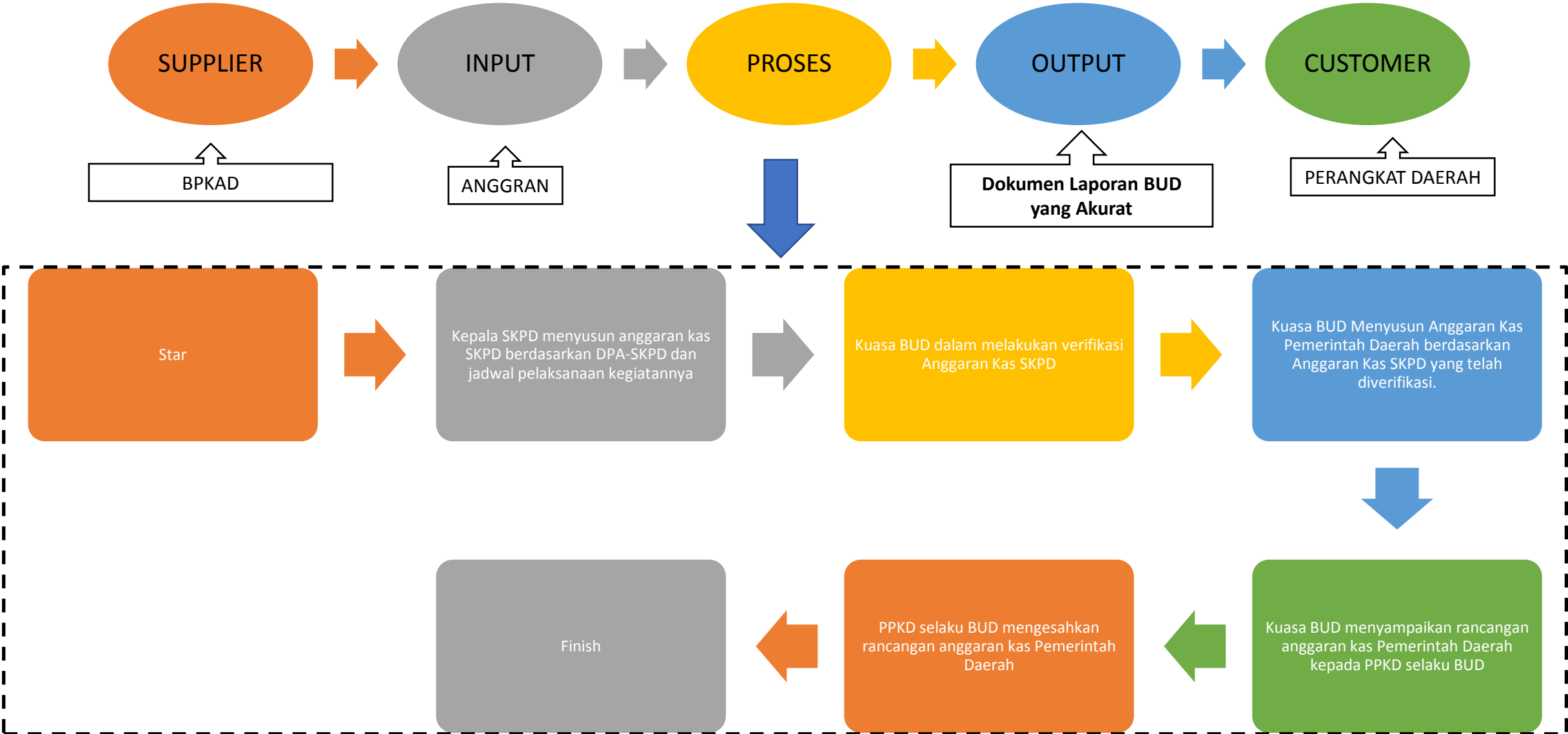
PROSES PENYUSUNAN RKA-SKPD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

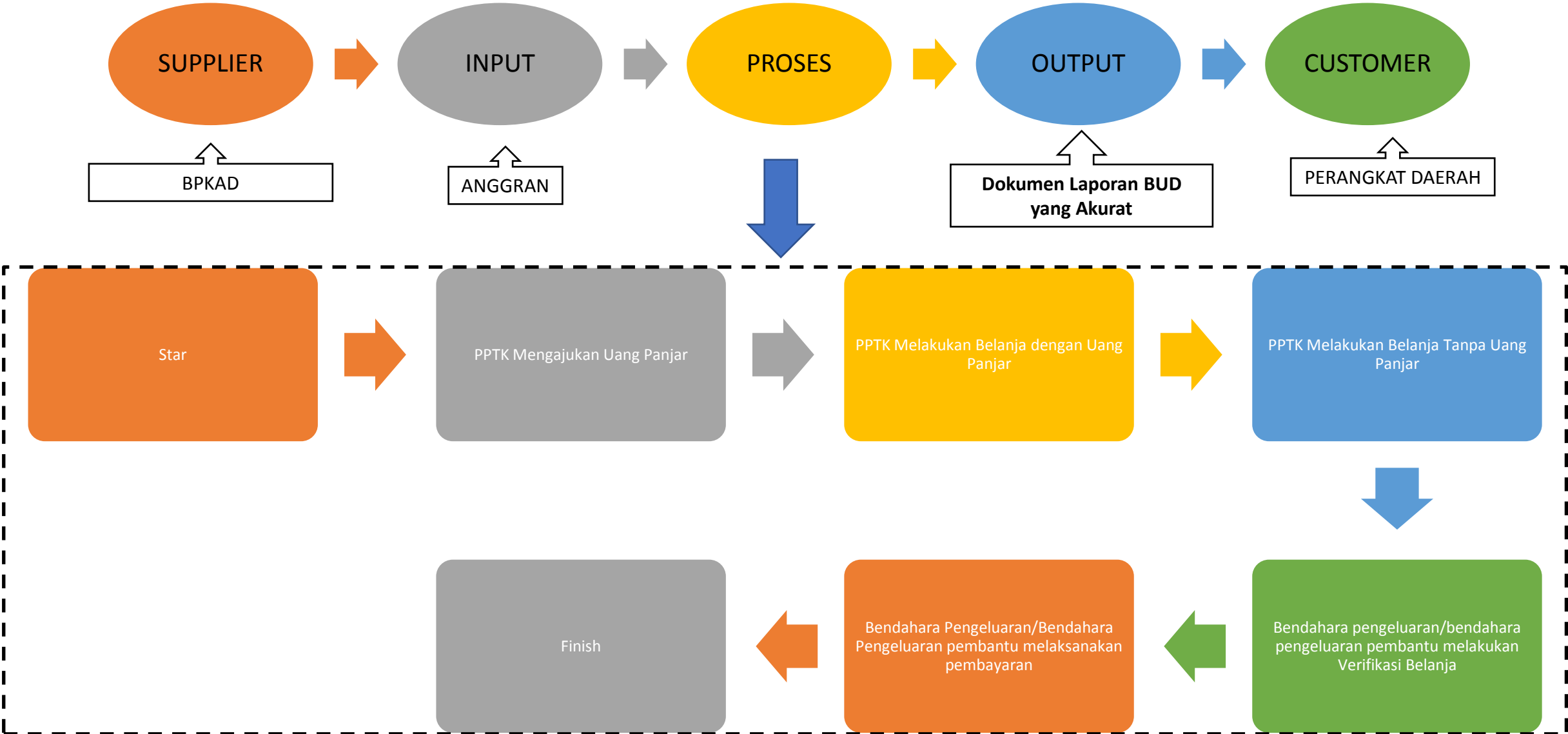
PROSES PENYIAPAN PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

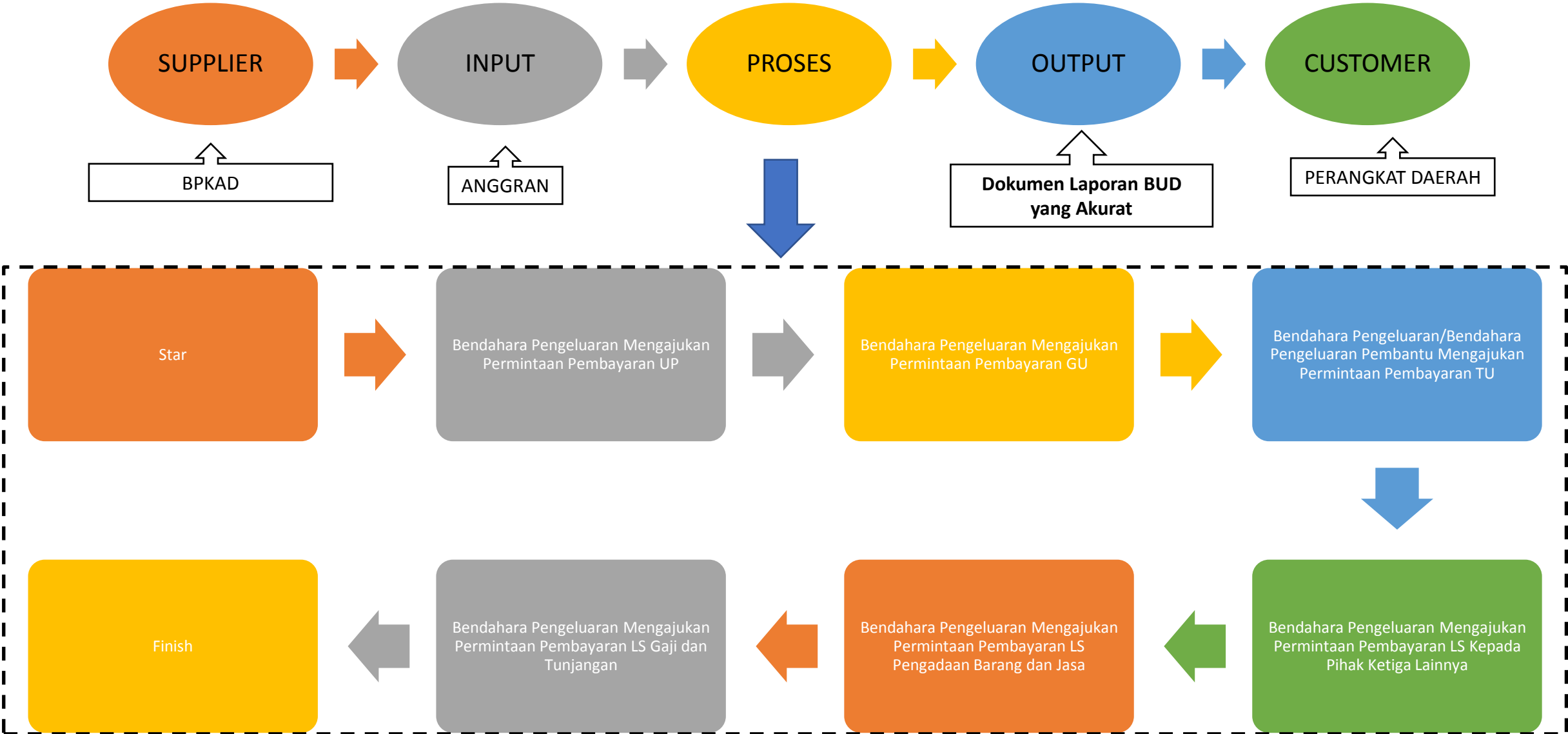
PROSES PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

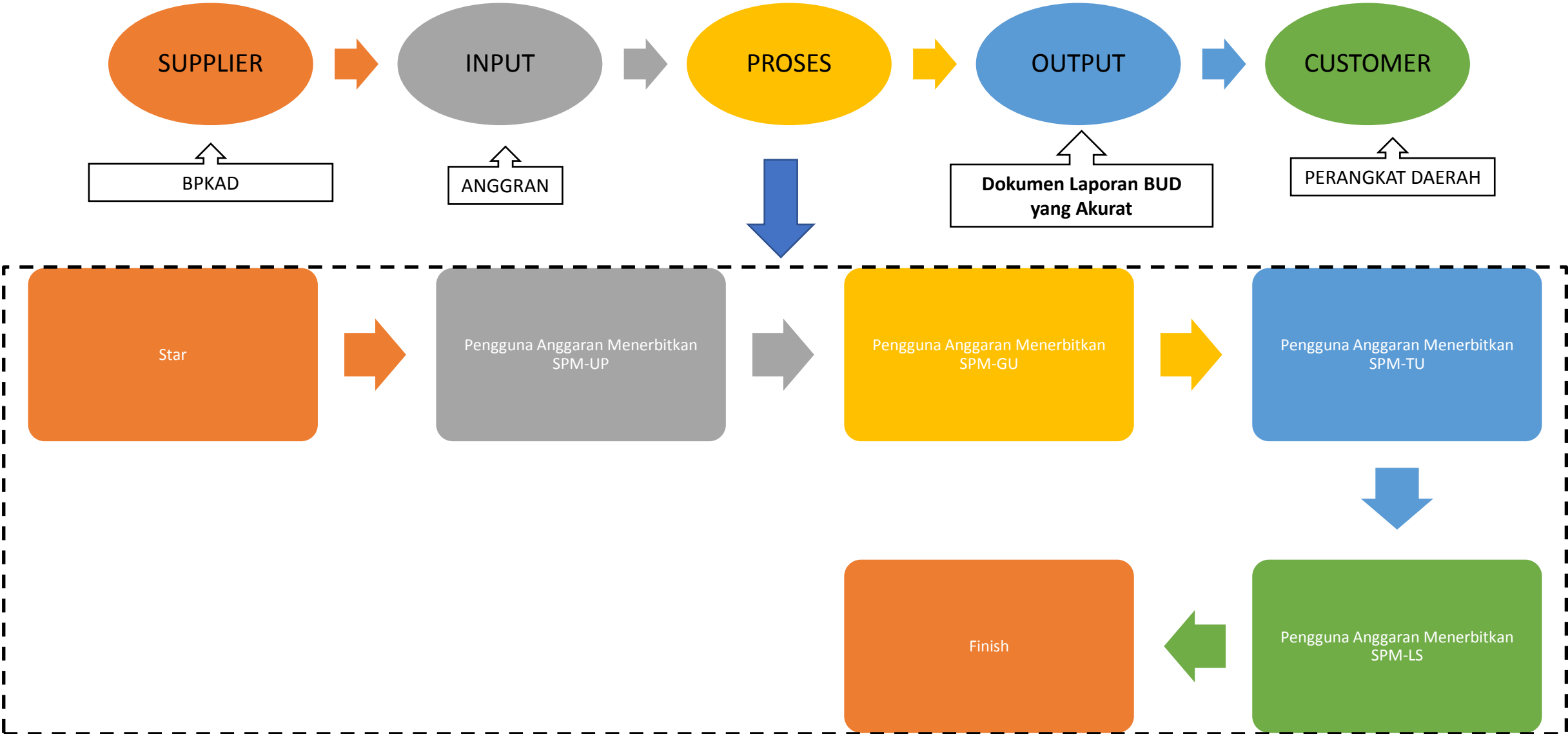
PROSES PERMINTAAN PEMBAYARAN



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

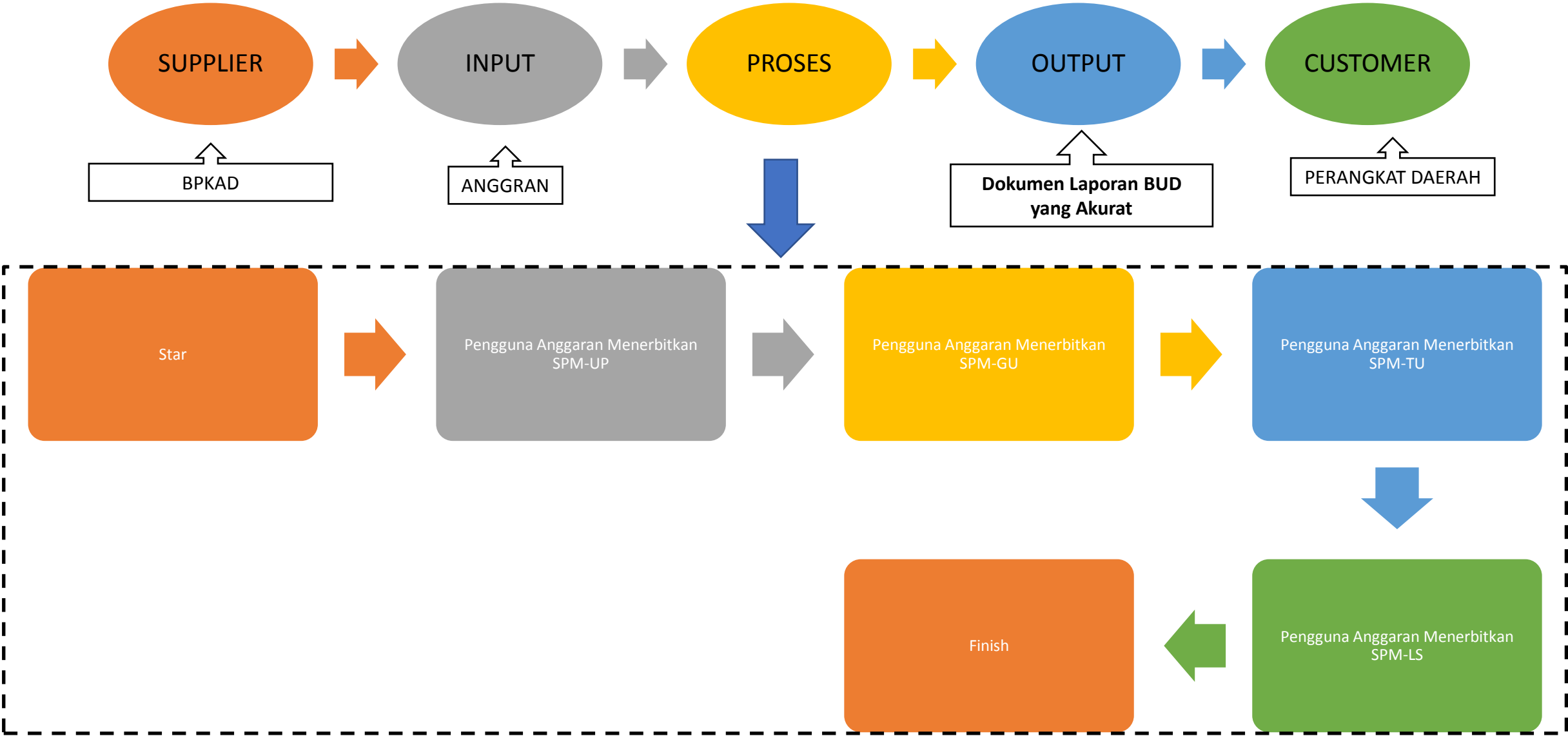
PROSES PERINTAH MEMBAYAR



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

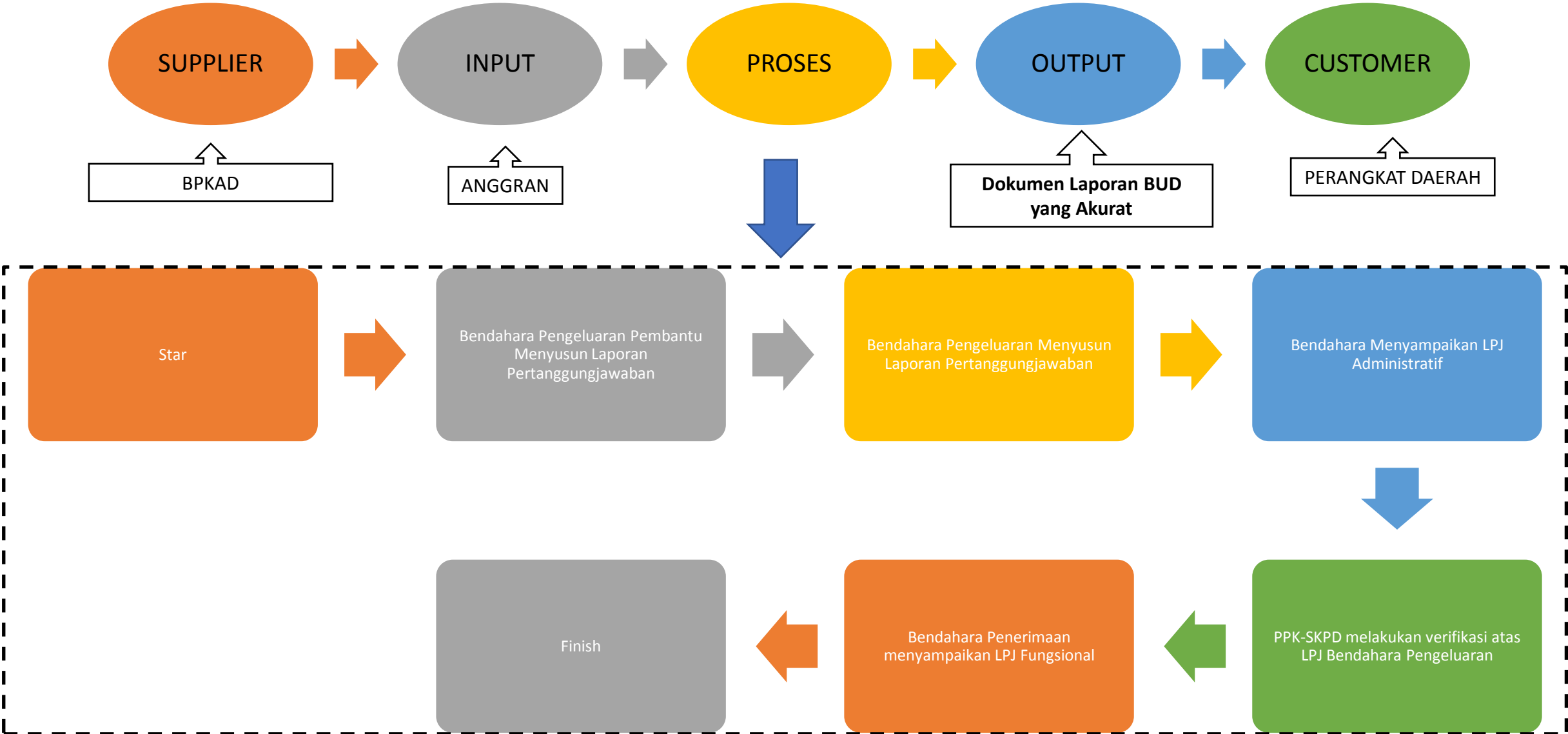
PROSES PERINTAH MEMBAYAR



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

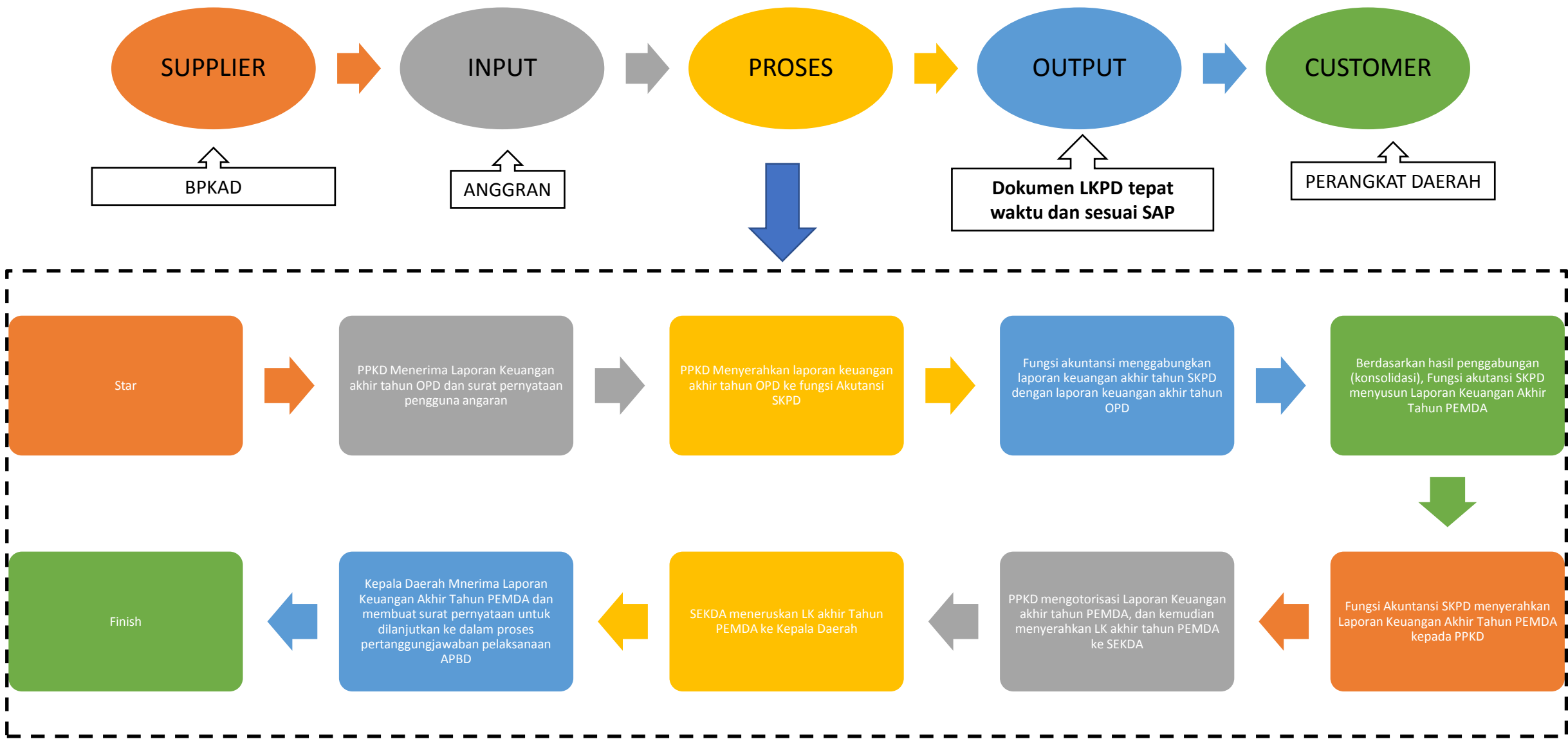
PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

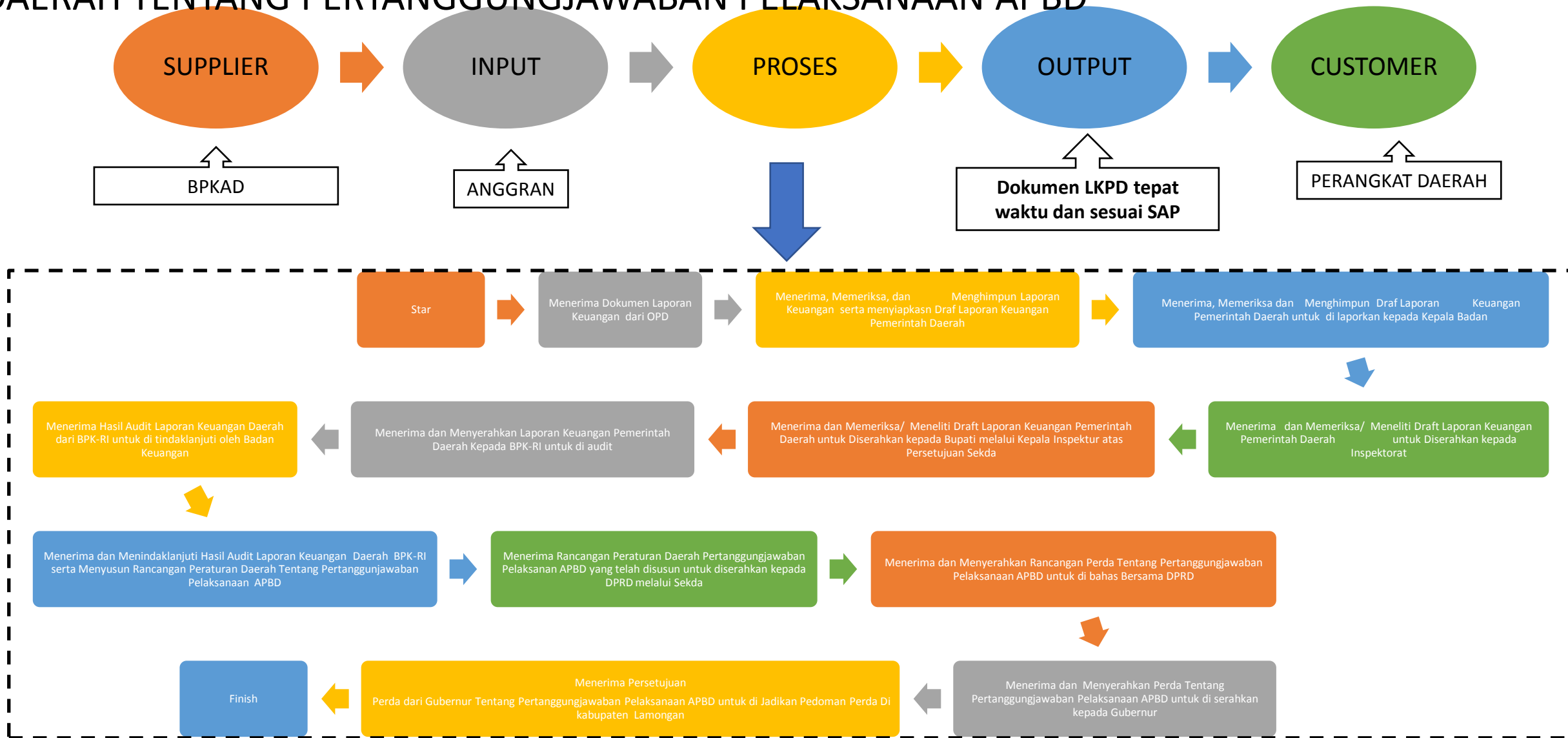
LEVEL II



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN

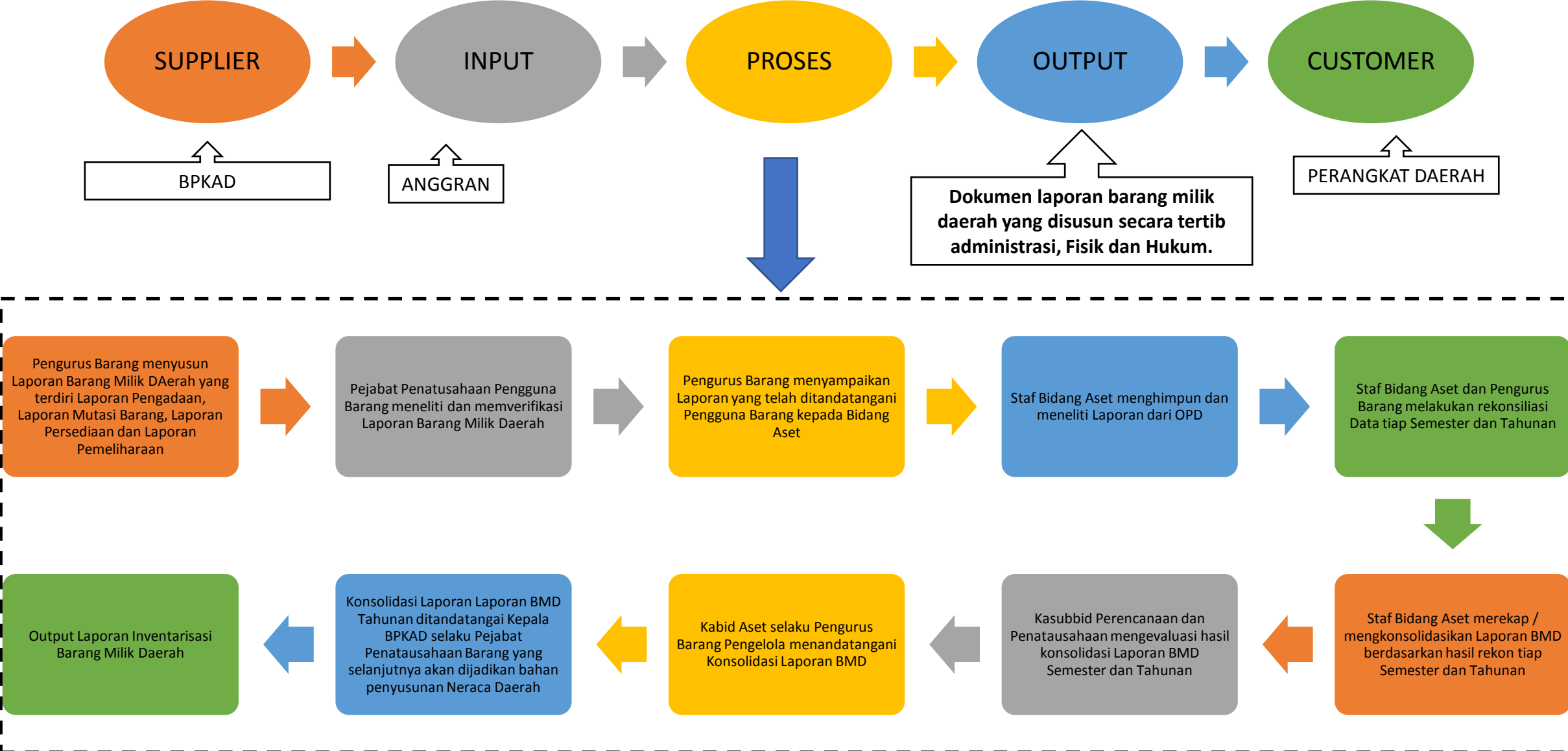
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

LEVEL III

PROSES INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH



Terima Kasih